BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 10/HK.01.01/K.BA/07/2026

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
TAHUN 2026

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Huruf c Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini

KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas: Informasi mengenai kelembagaan

KETIGA : Daftar Informasi Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas:
a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; dan
b. Informasi yang wajib disediakan tersedia setiap saat.

KEEMPAT : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 Juli 2026

Ketua Bawaslu Provinsi Bali,

I Putu Agus Tirta Suguna

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali
3. Yang Bersangkutan
4. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI
NOMOR 10/HK.01.01/K.BA/07/2026
TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TAHUN 2026

DAFTAR INFORMASI PUBLIK
BAWASLU PROVINSI BALI
TAHUN 2026

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang menguasai/ menyimpan Informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hardcopy	Softcopy	
A.	**INFORMASI KELEMBAGAAN**						
I.	INFORMASI BERKALA						
1.	Informasi Mengenai Keuangan						
a	DIPA 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
b	RKA Bawaslu Bali Tahun 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
c	Laporan Keuangan Bawaslu Bali Tahun 2025	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
d	Informasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2025	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
2.	Informasi Mengenai Organisasi, Administrasi, dan Kepegawaian						
a	LHKPN Bawaslu Bali 2025 (Komisioner)	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
b	LHKASN Bawaslu Bali 2025 (Kasek, Kabag)	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
c	Laporan Barang Milik Negara (BMN) Tahun 2025	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
d	Data ASN Bawaslu Bali Tahun 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
II. Informasi Mengenai Pencegahan, Parmas, Humas							

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang menguasai/ menyimpan Informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hardcopy	Softcopy	
1	Grafik Pemberitaan Website Bawaslu Bali Tahun 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
2	Ringkasan Laporan Akhir Kehumasan Bawaslu Bali Tahun 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
3	Ringkasan Laporan Akhir Pencegahan Parmas dan Humas Tahun 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
4	Penghargaan Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Tahun 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
III. Informasi Mengenai Data dan Informasi							
1	Penghargaan Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
2	Laporan Layanan Informasi Publik Bawaslu Bali Tahun 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2026	v		Sesuai dengan retensi arsip
3	SK Narahubung Data 2026	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
4	SK TIM KIP Bawaslu Bali 2026	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
5	SK DIP Bawaslu Bali 2026	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
IV. Informasi Mengenai Divisi SDM, Organisasi dan Diklat							
1	SK Penetapan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
2	SK Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
3	SK Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan *(Whistleblowing System)* Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Bali Tahun 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
4	SK Pembentukan Tim Pelaksana Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2026	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
5	SK PPK Bawaslu Kabupaten non Satker di Lingkungan Bawaslu Provinsi Bali	Bagian Administrasi	Bagian Administrasi	2026	v	v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

No	Ringkasan Isi Informasi	Unit yang menguasai/ menyimpan Informasi	Penanggung jawab pembuatan/penerbitan informasi	Waktu pembuatan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia		Jangka Waktu Penyimpanan
					Hardcopy	Softcopy	
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT							
1	SK Daftar Informasi Publik Bawaslu Bali 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip
2	SK TIM KIP Bawaslu Bali 2025	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat	2025	v	v	Sesuai dengan retensi arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).